

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICIES IN MEDAN SUNGGAL DISTRICT, PINANG BARIS

*Desi Marlina Sidabutar^(a,1), Faiz Muhammad Zacky^(b,1), Juni Kristiani
Meliala^(c,1), Peter Patiangbanua Purba^(d,1), Suci Rohani br Panjaitan^(e,1), Julia
Ivanna^(f,1)

¹ Universitas Negeri Medan

*desimarlinasidabutar4@gmail.com, faizzacky2@gmail.com, junikristiani328@gmail.com,
peterpurba662@gmail.com, sucipanjaitan24@gmail.com

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: desimarlinasidabutar4@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine community participation and identify obstacles in the implementation of waste management policies in Medan Sunggal District, specifically the Pinang Baris area. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Informants in this study consisted of local residents and Medan City Environmental Agency employees who were deemed to have relevant information related to the issues being studied. The data obtained were then analyzed inductively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that community participation in the implementation of waste management policies is still relatively low and inconsistent. This is evident in the community's irregular involvement in community-based activities, suboptimal household waste management practices, and low awareness of maintaining environmental cleanliness. Furthermore, the community still tends to mix waste and has not implemented sustainable waste sorting. This situation indicates that public awareness is actually starting to develop, but has not yet been matched by strong habits and commitment in daily practice. Furthermore, this study found several obstacles to the implementation of waste management policies, namely low public awareness, limited supporting facilities such as adequate trash bins, indiscriminate waste disposal, and a lack of public awareness campaigns. Therefore, the successful implementation of waste management policies depends not only on public participation but also requires adequate facilities and a sustained increase in the intensity of education and outreach from the government.*

Keywords: *Community Participation, Waste Management, Public Policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Sunggal, khususnya kawasan Pinang Baris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat setempat serta pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang dianggap memiliki informasi relevan terkait permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih tergolong rendah dan belum konsisten. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang bersifat tidak rutin,

Revised: Maret 18, 2026; Accepted: Maret 27, 2026; Online Available: April 26, 2026;

Published: April 26, 2026;

*Desi Marlina Sidabutar, desimarlinasidabutar@gmail.com

kebiasaan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga masih cenderung mencampur sampah dan belum menerapkan pemilahan sampah secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sebenarnya mulai terbentuk, namun belum diimbangi dengan kebiasaan dan komitmen yang kuat dalam praktik sehari-hari. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai, perilaku membuang sampah sembarangan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan fasilitas yang memadai serta peningkatan intensitas edukasi dan sosialisasi dari pemerintah secara berkelanjutan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu krusial yang dihadapi Indonesia saat ini. Sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, volume, jenis, dan karakteristik sampah terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai permasalahan nasional yang harus ditangani secara cepat dan tepat, tidak hanya untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat ekonomi, menjamin kesehatan masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih peduli lingkungan. (Apricia et al., 2023)

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemilahan sampah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga tujuan pengelolaan sampah yang efektif belum sepenuhnya tercapai. (Munawarah et al., 2025)

Selain itu, permasalahan sampah juga dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup yang berdampak pada meningkatnya volume serta keberagaman jenis sampah. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah turut memperburuk kondisi lingkungan, yang pada akhirnya menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup dan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. (Nurikah et al., 2022). Padahal, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan strategis, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. (Silahudin & Lestari, 2017)

Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Medan sebagai salah satu kota besar dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Peningkatan daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi yang semakin dinamis berkontribusi terhadap bertambahnya volume dan jenis sampah. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, seperti sistem pengelolaan sampah, sanitasi, dan infrastruktur lingkungan lainnya guna menjaga kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. (Nainggolan, 2024)

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dinilai belum memiliki fungsi dan kewenangan yang optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya prioritas penanganan sampah dalam kebijakan anggaran daerah. Pembiayaan pengelolaan sampah yang masih terbatas, seperti hanya mencakup honorarium tenaga kerja dan iuran masyarakat dengan nominal yang relatif

kecil, turut menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. (Arda et al., 2020)

Salah satu wilayah di Kota Medan yang masih menghadapi persoalan pengelolaan sampah adalah Kecamatan Medan Sunggal, khususnya di kawasan Pinang Baris. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di wilayah ini menyebabkan meningkatnya volume dan keragaman sampah. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat. (Simbolon et al., 2023)

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan pengelolaan sampah seringkali hanya dilakukan sebatas memindahkan dan membuang sampah tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui penyerahan sumber daya, seperti pembiayaan, sarana prasarana, serta personel, belum sepenuhnya mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat kecamatan. (Simbolon et al., 2023)

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kawasan Pinang Baris, Kecamatan Medan Sunggal, masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek kelembagaan, teknis, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah tersebut, guna mengetahui tingkat efektivitas

kebijakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Sumbangan tersebut dapat disampaikan melalui rapat kelompok masyarakat atau berbagai pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam forum-forum tersebut terjadi pertukaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta antar sesama anggota masyarakat, sehingga partisipasi pada dasarnya juga mencerminkan adanya komunikasi yang aktif dan timbal balik. (Putri et al., 2023)

Menurut Mubyarto (1997), partisipasi diartikan sebagai tindakan mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Sementara itu, Isbandi (E. Z. Siregar, 2020), mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada, memilih serta mengambil keputusan terhadap berbagai alternatif solusi, melaksanakan upaya pemecahan masalah, serta terlibat dalam proses evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dan menyeluruh dalam setiap tahapan proses pembangunan. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan secara fisik, tetapi juga mencakup peran intelektual

dan emosional masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi di lingkungannya. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam merumuskan alternatif solusi, mengambil keputusan yang tepat, serta melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang telah disepakati bersama.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus dinyatakan dalam bentuk nyata serta dilandasi oleh tujuan tertentu dalam rangka kepentingan negara dan bangsa. Kebijakan publik perlu diwujudkan dalam bentuk yang konkret dan operasional agar dapat diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berupa keputusan formal semata, tetapi juga harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, terutama dalam upaya mencapai kepentingan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Muadi et al., 2016)

Menurut Thomas R. Dye (1975:1), kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever government choose to do or not to do)”. Meskipun definisi ini cukup relevan, namun belum sepenuhnya memberikan batasan yang tegas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah dan apa yang benar-benar dilaksanakan. Para ahli yang termasuk dalam kubu pertama, seperti R.S. Parker (1975), Thomas R. Dye (1978), Edwards III, Ira Sharkansky, dan Carl Friedrich, memandang bahwa kebijakan publik secara ringkas mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam perspektif ini, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian perintah dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang berisi tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapainya. Sementara itu, kubu kedua yang diwakili oleh Pressman dan Wildavsky (1974)

mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengaitkan kondisi-kondisi awal dengan akibat yang dapat diramalkan. (Widiastuti, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirumuskan secara sistematis dan diwujudkan dalam bentuk nyata untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga tindakan yang tidak dilakukan, serta melibatkan proses yang berkelanjutan mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk program, maupun melalui kebijakan turunan (derivatif). Setelah suatu program ditetapkan, pelaksanaannya kemudian dijabarkan ke dalam proyek-proyek dan selanjutnya diwujudkan dalam berbagai kegiatan operasional. Dengan demikian, program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses implementasi kebijakan. (N. Siregar, 2022) Menurut Nugroho (2003:158), terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui tahapan perumusan kebijakan lanjutan yang lebih operasional.

Berkaitan dengan pengertian implementasi kebijakan tersebut, George C. Edward III (Nawawi, 2009) mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi). (Kaendung et al., 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Implementasi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup rangkaian kegiatan yang sistematis, mulai dari penjabaran kebijakan ke dalam program, proyek, hingga kegiatan operasional. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti komunikasi yang efektif antar pelaksana, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap atau komitmen pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang jelas dan terorganisasi.

Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang mengalami penurunan nilai guna apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan melalui suatu proses yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan pengurangan serta penanganan sampah dengan tujuan utama menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam perspektif modern, sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki potensi nilai ekonomi apabila dikelola secara tepat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada

pembuangan, melainkan juga pada upaya pemanfaatan kembali agar dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia.

Dalam praktiknya, pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan pendekatan hierarki yang menempatkan pengurangan sampah dari sumber sebagai prioritas utama. Tahapan ini kemudian diikuti oleh kegiatan daur ulang dan pengomposan untuk memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai guna. Selanjutnya, sampah yang tidak dapat didaur ulang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui teknologi tertentu, sedangkan pembuangan akhir ke tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi alternatif terakhir. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah sampah yang berakhir di TPA sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, semakin tinggi posisi suatu metode dalam hierarki, semakin besar kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pengelolaan sampah yang efektif juga perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Konsep ini dikenal sebagai Integrated Sustainable Waste Management (ISWM), yang menekankan pentingnya sinergi antara aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu sistem pengelolaan. Melalui pendekatan ini, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada proses pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga mencakup perencanaan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali sampah secara optimal. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. (Mahyudin, 2014)

Meskipun demikian, permasalahan utama dalam pengelolaan sampah tidak hanya terletak pada aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga pada paradigma dan perilaku masyarakat. Masih terdapat kecenderungan bahwa pengelolaan sampah dianggap sepenuhnya sebagai tanggung jawab

pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Padahal, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir, peningkatan edukasi, serta penanaman nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi langsung dapat dilakukan, misalnya, dengan menyediakan tempat sampah terpisah antara sampah basah dan sampah kering. Upaya ini memudahkan petugas kebersihan dalam proses pengumpulan serta memungkinkan sampah untuk dikelola lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir. Selain itu, partisipasi langsung juga diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilahan dan pengelompokan sampah. Sementara itu, partisipasi tidak langsung dapat berupa kontribusi dalam bentuk finansial maupun material untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah. (Hastika & Ismail, 2023)

Menurut teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (Rahmanita Fauzia & Arieffiani, 2020), partisipasi masyarakat terdiri atas empat kategori, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat bentuk partisipasi tersebut saling berkaitan dan apabila dilaksanakan secara terpadu, dapat mendorong terciptanya aktivitas pembangunan yang terintegrasi.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Partisipasi dalam tahap ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam rapat, diskusi, penyampaian gagasan, tanggapan, maupun penolakan terhadap suatu program.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Uphoff, masyarakat dapat berkontribusi dalam tahap ini melalui penyediaan tenaga, dana, barang, bahan, informasi, maupun sumber daya lainnya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono dalam (Susanty et al., 2023), metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang belum jelas, bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga data pada situasi sosial tidak dapat dijaring secara kuantitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara yang dirancang untuk memahami serta menemukan pola, teori, dan situasi sosial secara mendalam. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Sunggal,

khususnya kawasan Pinang Baris, masih tergolong belum optimal dan belum berjalan secara konsisten. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan masih bersifat situasional, seperti hanya mengikuti kegiatan gotong royong ketika memiliki waktu luang. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Meskipun sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan, namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, ditemukan bahwa praktik pemilahan sampah belum dilakukan secara optimal. Sebagian masyarakat mengaku pernah mencoba memisahkan sampah organik dan anorganik, namun dalam praktiknya masih sering tercampur kembali. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kebiasaan, keterbatasan fasilitas pendukung, serta anggapan bahwa proses pemilahan sampah cukup merepotkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran awal dari masyarakat, namun belum didukung oleh sistem dan sarana yang memadai, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal di tingkat rumah tangga.

Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah juga masih tergolong rendah. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui secara umum adanya kebijakan dari pemerintah terkait kebersihan lingkungan, namun belum memahami secara mendalam mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara efektif dan merata. Kegiatan sosialisasi yang terbatas, baik dari segi frekuensi maupun jangkauan, menyebabkan tidak semua masyarakat memperoleh informasi yang

cukup. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pengelolaan sampah, seperti kegiatan daur ulang maupun bank sampah, masih sangat terbatas.

Di sisi lain, keterbatasan fasilitas juga menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menghambat partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, ketersediaan tempat sampah, terutama yang mendukung pemilahan, masih sangat minim. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang baik, meskipun memiliki keinginan untuk melakukannya. Selain itu, perilaku membuang sampah sembarangan, khususnya oleh pengguna jalan, masih sering terjadi, sehingga mengurangi efektivitas upaya kebersihan yang telah dilakukan oleh petugas kebersihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya berasal dari masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang turut memperburuk keadaan lingkungan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Sunggal merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor seperti rendahnya kesadaran, kurangnya konsistensi, serta kebiasaan yang belum terbentuk menjadi penyebab utama. Sementara itu, dari sisi eksternal, kurangnya fasilitas pendukung serta minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang menekankan bahwa keterlibatan warga sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, serta dukungan lingkungan yang tersedia.

Lebih lanjut, kurang optimalnya strategi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah turut memperkuat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Padahal, sosialisasi yang efektif

seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan terdorong untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah. Tanpa adanya sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, masyarakat akan cenderung bersikap pasif dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif, seperti peningkatan edukasi lingkungan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penegakan aturan yang lebih tegas, guna mendorong perubahan perilaku masyarakat. Apabila hal tersebut dapat dilakukan secara konsisten, maka partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kecamatan Medan Sunggal, khususnya kawasan Pinang Baris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Sunggal, khususnya kawasan Pinang Baris, masih tergolong belum optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong yang belum dilakukan secara rutin serta masih bersifat situasional. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga belum sepenuhnya terbentuk sebagai kebiasaan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, dalam aspek pengelolaan sampah rumah tangga, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum terbiasanya melakukan pemilahan sampah serta adanya anggapan bahwa proses tersebut cukup

merepotkan. Akibatnya, sampah masih sering dicampur tanpa pemisahan antara jenis organik dan anorganik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran awal dari masyarakat, namun belum didukung oleh fasilitas yang memadai serta sistem yang memudahkan dalam penerapannya.

Selain itu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, seperti keterbatasan fasilitas, perilaku membuang sampah sembarangan, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana dan melakukan edukasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan pemerintah agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Apricia, N., Jeremiah, M., & Trinovada, A. (2023). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 553–559.
- Arda, M., Andriany, D., & Manurung, Y. H. (2020). Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Medan. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*.
- Hastika, R., & Ismail, H. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Di Kelurahan Kedung Baru. *Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 157–168.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2), 1–11.
- Mahyudin, R. P. (2014). *STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN*.

Enviro Scienteae, 10, 33–40.

Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Review Politik*, 06(02), 195–224.

Munawarah, F., Halim, M. B., & Prastiwi, D. E. (2025). PRAKTIK PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI DAN IMPLIKASI SANKSI PIDANA BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. *Causa : Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2).

Nainggolan, J. V. (2024). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat. *Comserva : Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(9), 1418–1437. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.1550>

Nurikah, Jajuli, H. . R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434–442.

Putri, S. N. A., Novaria, R., & Wahyudi, E. (2023). PENGARUH MOTIVASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN DESA SENDANGREJO KABUPATEN LAMONGAN. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 108–126.

Silahudin, & Lestari, S. (2017). PENGELOLAAN SAMPAH, TINJAUAN KEBIJAKAN. *Sosio Dan Humaniora*, 3(2).

Simbolon, B. R., Pin, P., & Gulo, T. Y. (2023). Page | 176. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal) Oleh, 2(1), 176–185.

Siregar, E. Z. (2020). Jurnal at-taghyir. *Jurnal At-Taghyir : Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(1), 131–148.

Siregar, N. (2022). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

*COMMUNITY PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICIES IN
MEDAN SUNGGAL DISTRICT, PINANG BARIS*

DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA). *Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.

Susanty, A., Indasari, N. L., Oktavianty, H., Ayyubi, I. I. Al, Purnamasari, D. A.,
Ryandini, E. Y., Abdullah, H., Inayati, T., Ahsan, M., Vernanda, D., Susilawati, &
Bekata, H. M. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF. FUTURE
SCIENCE.*

Widiastuti, I. (2022). *Kebijakan Publik (Cetakan Pe). INSAN CENDEKIA MANDIRI.*